



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2022

INSPEKTORAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Jln. Prof.Lafran Pane Sapiro, Kode Pos 22742

Telp.(0634) 4345199 Faks (0634) 4345199 email :itkab_tapsel@yahoo.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, memuat program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah, berdasarkan pada evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun lalu, serta memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat.

Beranjak dari visi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022-2026 yaitu *Tapanuli Selatan Yang Maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun Yang Unggul, Sehat Cerdas, Sejahtera Serta Sumber Daya Alam Yang Produktif Dan Lestari* dan Misi Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ)
2. Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
5. Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Tahun 2022 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan, maka Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 07 Drt 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tapanuli Selatan – Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
- 12) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan tahun 2022 untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tujuan disusunnya Renja Tahun 2022 ini adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan untuk penyusunan Rencana Kerja Inspektorat yang memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2022 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang mempunyai tugas membina dan mengawasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Tahun 2022 diformulasikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;

1.3 Maksud dan Tujuan;

1.4 Sistematika Penulisan.

Bab. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value For Money* Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Indikator Masukan (*input*), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdayayang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- b. Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- c. Indikator Hasil (*Outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan - kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 triwulan I adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2022

No	Kode	Urusan /Bidang /Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)
1.	6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100%		100%		-	-	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renja, Perubahan Renja, RKA, RKPA, DPA, dan Dokumen Renstra	100%		100%	-	0	-	-
	6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Program Tahunan Inspektorat Daerah	7	7	7	7	100	14	200,00
	6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terpenuhiya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan RKA APBD	7		7	5	100,00	5	71,43
	6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Terpenuhiya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan RKA P. APBD Inspektorat Daerah	7		7	-		-	-
	6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terpenuhiya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan DPA Inspektorat Daerah	7		7	-		-	-
	6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terpenuhiya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan DPA APBD Inspektorat Daerah	7		7	-		-	-
	6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP Inspektorat Daerah	7	7	7	5	100,00	12	171,43
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%		100%	-		-	-
	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhiya Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Inspektorat Daerah	36	12	36	38	26,39	50	138,89
	6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terselenggaranya Pelaksanaan Tugas Rutin Kantor	12	12	12	3	25,00	15	125,00
	6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Inspektorat Daerah	12	12	12	5	100,00	17	141,67
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Daya Dukung Kinerja ASN	100%		100%	-	-	-	-
	6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Pegawai Inspektorat Daerah	42	42	42	-		42	100,00
	6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Inspektorat Daerah	8	8	8	-		8	100,00
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Daya Dukung Kinerja ASN	100%		100%	-	-	-	-
	6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhiya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor	60	60	60	10	100,00	70	116,67
	6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhiya Penyediaan dan Perlengkapan Kantor	1	1	1	-		1	100,00
	6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhiya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	12	1	100,00	13	108,33
	6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhiya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	12	12	12	3	25,00	15	125,00

6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Langganan Media Cetak	12	12	12	-		12	100,00
6.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya Kebutuhan Materi Kantor	300	300	300	75	25,00	375	125,00
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Pelayanan Prima Kunjungan Tamu	12	12	12	-		12	100,00
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah	320	301	320	-	6,25	301	94,06
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)	100%		100%	-	-	-	-
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Pengadaan Mebel (Kursi Tamu dan Lemari)	2		2	-		-	-
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Laptop dan Printer Kantor	10	36	10	-		36	360,00
6.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Kantor (RAK Arsip, Pembuatan Partisi dan Perengkapannya)	1	1	1	-		1	100,00
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Kursi Kantor	36	36	36	-		36	100,00
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	90%		90%	-	-	-	-
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya Surat Selama 1 Tahun	2.000	2.000	2.000	-	7,50	2.000	100,00
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Pembayaran Air, Listrik dan Wifi	12	12	12	3	25,00	15	125,00
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Pembayaran Jasa /Honorarium Pelayanan Umum Kantor	9	9	9 Org	9	8,33	18	200,00
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terjaganya kondisi fisik dan perizinan Barang Milik Daerah	100%		100%	-	-	-	-
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	2	2	2	-	50,00	2	100,00
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Lapangan dan Pembayaran Pajak	4		4	-	50,00	-	-
6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12		12	-		-	-
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya PC, Laptop dan Printer Kantor	10	10	10	3	60,00	13	130,00
6.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Aset Kantor	5		5	-		-	-
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	1	1	1	-		1	100,00
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1		1	-		-	-
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja OPD, Desa dan Kelurahan	100%		100%	-	-	-	-
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya kegiatan pengawasan internal berkala	150	145	150	-		145	96,67
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeriksaan Kinerja Sesuai dengan Program Kerja Tahunan	45	45	45	1	2,22	46	102,22
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeriksaan Keuangan Sesuai Dengan Pelaksanaan Kegiatan OPD	45	45	45	1	2,22	46	102,22

6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja sesuai dengan Program Kerja OPD	15		15	1	2,22	1	6,67
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan Sesuai Dengan Pelaksanaan Kegiatan OPD	45	45	45	1	2,22	46	102,22
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Pemeriksaan Dana Desa Sesuai Dengan Program Pelaksanaan Kegiatan Desa	211	211	211	-		211	100,00
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Tindaklanjut Terhadap Hasil Temuan Pengawasan	80%	80%	80%	1	100,00	2	225,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	50		50	-	-	-	-
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	5	20	30	1	3,33	21	420,00
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	2	2	40	3	30,00	5	250,00
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Obrik yang dilakukan asistensi dan Pendampingan	100%		100%	-	-	-	-
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya pendampingan, asistensi, fasilitas dan koordinasi di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan	45		10	-	-	-	-
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Penilaian Manajemen Berbasis Resiko	45	45	45	11	24,44	56	124,44
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokras	Terselenggaranya Reviu Kinerja dan Penilaian Reformasi Birokrasi	33	11	33	-		11	33,33
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terselenggaranya Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli dan terwujudnya Pemerintahan yang Bersih Jujur, dan Adil	45	45	45	-		45	100,00
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Tersusunnya LHKPN Kabupaten Tapanuli Selatan	45	45	45	45	100,00	90	200,00

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA INSPEKTORAT Tahun 2022 triwulan I disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Program/kegiatan yang belum memenuhi target kerja hasil/keluaran hingga triwulan I akan tetapi diperkirakan akan tercapai hingga akhir tahun 2022 adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat;
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan:

- Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
- Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan internal terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu: Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan.

- Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi:
- Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.
- b. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan hingga triwulan I akan tahun 2022 adalah:
- Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal sub kegiatan Reviu Laporan Keuangan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Sesuai dengan dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022-2026 yang telah disusun maka hubungan antara tujuan, sasaran serta indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	"Terpenuhi nya penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bersih dan berwibawa."	Jumlah Kegiatan Pengawasan	Meningkat nya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Nilai MaturitasSPIP (Level)	3,6000	3,7000	3,8000	3,9000	3,9500
				Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	90,00	91,00	93,00	95,00	95,00
				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00
				Persentase perangkat Daerah yang mendapat Nilai Evaluasi Minimal BB	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
				Persentase aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang memiliki Standar Kompetensi	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
				Peningkatan Kapabilitas APIP (Level)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
				Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat pendampingan	35,00	38,00	42,00	45,00	45,00

Adapun evaluasi dan analisis sasaran meningkatnya penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja INSPEKTORAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100	25,00	25,00	Belum tercapai
	Nilai Maturitas SPIP (Level)	Level	3,6	3,6	Level 2	Belum tercapai
	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	%	90	91,2	101,33	Tercapai
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	%	92	90,8	98,70	Belum tercapai
	Persentase perangkat Daerah yang mendapat Nilai Evaluasi Minimal BB	%	65	-	-	Belum tercapai
	Persentase aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang memiliki Standar Kompetensi	%	71	68,42	96,37	Belum tercapai
	Peningkatan Kapabilitas APIP (Level)	Level	3	3	-	Belum tercapai
	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat pendampingan	OPD	35	-	-	Belum tercapai

- Capaian indikator Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sebesar 25 %, capaian tersebut dihitung dari kegiatan yang telah dilaksanakan selama TW I dibandingkan dengan dengan kegiatan selama 1 Tahun atau 12 Bulan;
- Capaian indikator Nilai Maturitas SPIP (Level) masih pada level 2;
- Capaian Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti yaitu sebesar 101,33 %;
- Capaian Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti dihitung dari Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (disajikan berdasarkan pemantauan kepatuhan TLHP BPKRI) sebesar 96,37%
- Capaian Persentase aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang memiliki Standar Kompetensi dihitung dari jumlah Fungsional Auditor dan PPUD dibandingkan dengan jumlah Pegawai Inspektorat;
- Capaian Kapabilitas APIP (Level) masih pada level 2;
- Capaian Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat pendampingan belum mencapai target kinerja.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi, yaitu:

a. Faktor Pendorong

1. Mekanisme kerja Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan yang berorientasi kepada pencapaian kinerja;
2. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staff Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi;
3. Adanya kerja sama yang baik dari perangkat daerah terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan;
4. Pola kerja yang sistematis dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal efektif dan efisien.

b. Faktor Penghambat

- Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan jumlah objek (perangkat daerah, desa, kelurahan, objek lainnya) yang diperiksa;
- Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan perangkat daerah belum optimal;
- Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain:

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan belum berjalan dengan baik (nilai SAKIP Pemerintah Tahun 2021 = C) sehingga tantangan kedepan terhadap SAKIP

Kabupaten Tapanuli Selatan masih harus berbenah untuk meningkatkannya.

3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan mengedepankan peran sebagai *Quality Assurance* (menjamin kualitas dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan.
4. Maturitas SPIP di awal Tahun 2022 Level 3 (nilai 3,5480) harus ada peningkatan score (nilai 3,6000) dengan tetap mengedepankan profesionalisme APIP sebagai *Quality Assurance* bagi Bupati Tapanuli Selatan.
5. Maturitas Kapabilitas APIP di awal Tahun 2022 Level 2 plus harus ada peningkatan menjadi level 3.
6. Rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik, namun tetap harus ditingkatkan.
7. Pelaksanaan riviui menjadi perhatian dan harus ditingkatkan
8. Pemenuhan data terhadap kegiatan KPK dan Kemendagri yang harus dilaksanakan diantaranya, SPI, UPG, MCP, LHKPN, Inovasi, Peningkatan Pelayanan Publik.

2.4 Reviu Terhadap RKPD

Pada Saat Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Triwulan III Tahun 2022 ini, riviui terhadap RKPD 2022 tidak dilaksanakan, namun akan dilaksanakan riviui pada saat evaluasi akhir tahun atau Triwulan IV.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan. Khusus untuk bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada dan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022

NO	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
TIDAK ADA USULAN					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana pembangunan jangka panjang nasional 2020-2024 menggariskan Visi Indonesia Tahun 2022 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan Tahun 2022 berada pada tahap jangka menengah yang ke-satu yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan Visi MEWUJUDKAN INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.

Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, maka berdasarkan RKPd Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1. Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH
1	Ekonomi	
2	Lingkungan	
3	Politik	
4	Hukum	
5	Pertahanan & Keamanan	
6	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan: a. Meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel b. Meningkatkan penyelenggaraan tatakelola pemerintah yang baik
7	Kesejahteraan Rakyat	
8	Kewilayahan	
9	Kelautan	

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi INSPEKTORAT Kabupaten Tapanuli Selatan maka Prioritas Nasional yang berkaitan langsung adalah pada Prioritas ke-6 yaitu Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan pembangunan daerah diharapkan mampu mengawal setiap regulasi dan kebijakan yang ditetapkan Bupati supaya berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat yaitu: Tujuan Rencana Kerja Inspektorat adalah: Terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bersih dan berwibawa.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja SKPD

1.3 Program dan Kegiatan

A. Program

Dari uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa dan perencanaan program pengawasan, Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian tugas pengawasan pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada program RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dirumuskan program yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan sumber daya, kewenangan pengawasan dengan program sebagai berikut :

Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2022

No	Kode	Urusan /Bidang /Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan
1.	6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD
	6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

	6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	6.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material
	6.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu
	6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel
	6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	6.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
	6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel
	6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	6.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
	6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
	6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja
	6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan
	6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa
	6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu
	6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
	6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
3	6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi
	6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
	6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokras
	6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada renstra Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Perangkat daerah Tahun 2022
 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. berikut ini:

No	Kode	Urusan /Bidang /Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi	
				Target	Rp
1.	6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100%	5.844.743.857
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renja, Perubahan Renja, RKA, RKPA, DPA, dan Dokumen Renstra	100%	25.237.800
	6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Program Tahunan Inspektorat Daerah	7	1.034.200
	6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan RKA APBD	7	7.480.000
	6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan RKA P. APBD Inspektorat Daerah	7	2.113.400
	6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan DPA Inspektorat Daerah	7	5.995.000
	6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan DPA APBD Inspektorat Daerah	7	5.216.400
	6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP Inspektorat Daerah	7	3.398.800
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	4.527.606.677
	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Inspektorat Daerah	36	4.483.606.677
	6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terselenggaranya Pelaksanaan Tugas-Tugas Rutin Kantor	12	40.000.000
	6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Inspektorat Daerah	12	4.000.000
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Daya Dukung Kinerja ASN	100%	137.022.200
	6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Pegawai Inspektorat Daerah	42	31.198.200
	6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Inspektorat Daerah	8	105.824.000
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Daya Dukung Kinerja ASN	100%	341.006.200
	6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor	60	7.187.700
	6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan dan Perlengkapan Kantor	1	20.000.000
	6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	43.322.500
	6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	12	50.000.000
	6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Langganan Media Cetak	12	42.500.000
	6.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya Kebutuhan Materai Kantor	300	3.000.000
	6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Pelayanan Prima Kunjungan Tamu	12	15.000.000
	6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah	320	159.996.000
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)	100%	349.754.600

6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Pengadaan Mebel (Kursi Tamu dan Lemari)	2	19.877.400
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Laptop dan Printer Kantor	10	159.999.800
6.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Kantor (RAK Arsip, Pembuatan Partisi dan Perlengkapannya)	1	19.877.400
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Kursi Kantor	36	150.000.000
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat (%)	90%	369.590.680
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya Surat Selama 1 Tahun	2.000	13.923.000
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Pembayaran Air, Listrik dan Wifi	12	36.200.000
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Pembayaran Jasa / Honorarium Pelayanan Umum Kantor	9 Org	319.467.680
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terjaganya kondisi fisik dan perizinan Barang Milik Daerah	100%	94.525.700
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	2	19.996.800
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Lapangan dan Pembayaran Pajak	4	29.993.200
6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12	9.805.600
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya PC, Laptop dan Printer Kantor	10	9.783.900
6.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Aset Kantor	5	4.950.000
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	1	10.000.000
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1	9.996.200
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja OPD, Desa dan Kelurahan	100%	1.447.645.000
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya kegiatan pengawasan internal berkala	150	1.155.146.000
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeriksaan Kinerja Sesuai dengan Program Kerja Tahunan	45	666.345.000
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeriksaan Keuangan Sesuai Dengan Pelaksanaan Kegiatan OPD	45	38.610.000
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja sesuai dengan Program Kerja OPD	15	161.625.000
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan Sesuai Dengan Pelaksanaan Kegiatan OPD	45	78.570.000
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Pemeriksaan Dana Desa Sesuai Dengan Program Pelaksanaan Kegiatan Desa	211	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Tindakan Lanjut Terhadap Hasil Temuan Pengawasan	80%	209.996.000
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	50	292.499.000
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	30	92.499.000

6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	40	200.000.000
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Obrik yang dilakukan asistensi dan Pendampingan	100%	839.406.820
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya pendampingan, asistensi, fasilitas dan koordinasi di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan	10	839.406.820
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Penilaian Manajemen Berbasis Resiko	45	290.000.000
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokras	Terselenggaranya Reviu Kinerja dan Penilaian Reformasi Birokrasi	33	50.000.000
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terselenggaranya Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli dan terwujudnya Pemerintahan yang Bersih Jujur, dan Adil	45	319.169.320
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Tersusunnya LHKPN Kabupaten Tapanuli Selatan	45	180.237.500

BAB IV

PENUTUP

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dari sebelumnya. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2022 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Akhirnya, Evaluasi Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2022 serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran. Selain itu dukungan maupun Political Will dari pemerintah daerah dan seluruh organisasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan juga turut serta menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan pada umumnya.

Sipirok, 2022
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN



M. ALI IMRAN, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680715 199402 1 001